

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sukabumi

*(The Influence of Regional Tax Revenue and Regional Retribution on Regional
Original Income in Sukabumi Regency)*

Muhammad Imam Rifki¹, Mita Alfiana²

Universitas Nusa Putra

Universitas Nusa Putra

muhamad.imam_ak21@nusaputra.ac.id¹, Mita.alfiana_ak21@nusaputra.ac.id²

Abstrak: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menguasai dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kepentingan masyarakat setempat, masing-masing memuat ketentuan pelaksanaan otonomi daerah. karena fokus utama penelitian kami adalah pada data numerik. Penelitian studi kasus di Kabupaten Sukabumi tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 menggunakan model penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel independen dan model regresi menunjukkan hubungan linier, menurut uji asumsi konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi sedangkan penerimaan retribusi daerah sekitar tidak memiliki dampak yang terlihat dan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah keduanya berdampak terhadap pendapatan asli daerah di wilayah Sukabumi.

Kata kunci: *Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah*

Abstract: Law Number 32 of 2004 and Law Number 33 of 2004 concerning Regional Government, which give the regions the power to control and manage their governmental affairs, economic development, and local community interests, respectively, contain provisions implementing regional autonomy. since the primary focus of our research is on numerical data. The case study research in Sukabumi Regency from 2014 to 2022 uses a descriptive research model using quantitative methods and information from the Central Bureau of Statistics (BPS). The independent variable and the regression model exhibit a linear relationship, according to the conventional assumption test. The results of this study show that regional tax revenues have a significant impact on local original income for Sukabumi Regency while nearby levy receipts have no discernible impact and that regional tax revenues and regional fees both have an impact on initial regional revenue in the Sukabumi region.

Keywords: *Regional Taxes, Regional Levies, and Local Own Revenue*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah disebut dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan negara kekuasaan untuk mengontrol dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kepentingan masyarakat lokal mereka sendiri, serta kekuasaan untuk melaksanakan anggaran rumah tangga mereka.

Pendapatan asli daerah (PAD) sebagian besar berasal dari pajak daerah dan retribusi. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar adalah Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian tentang dampak penerimaan pajak dan retribusi terhadap PAD di Kabupaten Sukabumi.

Pendapatan asli daerah (PAD) berfungsi sebagai sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah untuk memberikan berbagai layanan pembangunan dan barang publik. Daerah Berpenghasilan mencakup berbagai unsur, melibatkan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah sebagai badan usaha yang disimpan oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber utama pendanaan untuk berbagai prakarsa pembentukan dan pelayanan publik pemerintah daerah. Ketiga unsur tersebut berkontribusi dalam penciptaan pendapatan daerah.

Penggerak utama produksi pendapatan asli daerah adalah pemungutan pajak daerah. Pajak daerah adalah persyaratan yang

dianggap dibayar oleh warga negara atau badan usaha kepada pemerintah yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Penerimaan pajak yang baik dapat memberikan peran signifikan terhadap PAD daerah, sehingga penting untuk memahami pengaruhnya terhadap pembentukan PAD.

Retribusi daerah juga sangat berperan serta penciptaan pendapatan asli daerah. Retribusi atas penggunaan barang milik negara atau daerah atau atas jasa yang dibagikan oleh pemerintah disebut pungutan daerah. Contohnya, retribusi parkir, retribusi penggunaan pasar, dan retribusi penggunaan jasa layanan publik lainnya. Penerimaan retribusi yang efektif dan optimal dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD, sehingga diperlukan analisis mengenai pengaruhnya terhadap pembentukan PAD daerah.

Untuk penelitian ini, harus dikaji pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum bagaimana faktor ini mempengaruhi pendapatan daerah. Temuan penelitian dianggap memberikan data yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan optimal guna meningkatkan PAD serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

pendapatan daerah, khususnya pendapatan pemerintah daerah, direaksikan sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih pada periode tersebut.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fungsi pajak daerah dan retribusi daerah

1. Pajak Daerah

Pajak daerah mempunyai peran yang penting untuk kehidupan bernegara, terutama untuk melaksanakan pembangunan, pajak daerah yaitu sumber penerimaan negara dari semua pengeluaran termasuk biaya pembangunan. Dari pembahasan tersebut pajak daerah mempunyai fungsi, yaitu:

a. Penganggaran (Budgetair)

Pengeluaran pemerintah dibiayai oleh pajak daerah. Melakukan tugas rutin pemerintahan dalam menyelesaikannya pembangunan negara yang membutuhkan uang. Penerimaan pajak digunakan untuk mendapatkan pembayaran. Pajak daerah digunakan untuk membayar hal-hal seperti staf, perlengkapan, pemeliharaan, dll. Tabungan pemerintah, seperti pendapatan rumah tangga dikurangi pengeluaran normal, digunakan untuk membayar pembiayaan pembangunan. Tabungan negara ini harus ditambah setiap tahunnya ditambah

dengan dana pembangunan yang lebih besar, terutama dari sektor pajak.

b. Konfigurasi (Regulasi)

Pemerintah menggunakan kebijakan pajak sebagai sarana untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. fungsi pengaturan ini pembayaran pajak daerah dapat dimanfaatkan dalam menciptakan tujuan. Contohnya sebagai insentif pajak diberikan untuk mendorong investasi dalam negeri atau luar negeri. Untuk barang yang dibuat di luar negeri, pemerintah menetapkan biaya impor yang besar. untuk melindungi industri, khususnya manufaktur dalam negeri.

c. Stabilitas

Kemampuan implementasi pajak pemerintah untuk melakukan program-program yang berkaitan dengan stabilitas harga untuk memerangi kenaikan, seperti mengendalikan aliran uang masyarakat, mengumpulkan pajak, dan memanfaatkan pajak yang dikumpulkan secara efektif dan efisien.

d. Redistribusi Pendapatan

Semua kepentingan publik, termasuk pendanaan pembangunan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dibiayai oleh pajak daerah yang dipungut oleh negara.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dari pajak daerah. Sebab peran pentingnya dalam pemasukan keuangan daerah. Pajak daerah dipergunakan dalam membiayai pengeluaran daerah yang gantinya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pendapatan daerah lebih dipengaruhi oleh pajak daerah meskipun totalnya sangat kecil dari pajak pusat. Oleh karena itu, dampak pajak daerah sangat besar daripada pajak pemerintah.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan pengumpulan uang oleh pemerintah daerah untuk membayar layanan atau hak istimewa tertentu yang telah secara eksplisit diberikan kepada orang atau bisnis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan Retribusi Daerah; kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tercatat dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fungsi Retribusi Daerah:

Retribusi daerah sangat berperan dalam dan memperlancar terwujudnya otonomi daerah. Itu karena pengaturan pembagian kekuasaan sistem otonomi daerah antara otoritas federal dan otoritas lokal lebih dari sekadar memerintah. Desentralisasi perpajakan juga penting. Desentralisasi anggaran merupakan syarat pemenuhan kebutuhan anggaran karena diperlukan dana untuk otonomi daerah. Tindak pidana menjadi sumber PAD berdasarkan UU

Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan lokal dipengaruhi oleh pajak daerah. Pajak daerah memberikan bagian yang tidak proporsional dari pendapatan asli daerah, meskipun dampaknya terhadap pertumbuhan pendapatan daerah utama kurang.

Penelitian terdahulu

Pada penelitian sebelumnya oleh Rudy Presetio, Kajian Pengaruh Penerimaan Sanggar Seni Daerah dari Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak dan Retribusi Daerah (Kasus Kotamadya atau Kabupaten Magetan) diketahui bahwa penerimaan pajak daerah yang memiliki dampak yang menguntungkan bagi peningkatan pendapatan yang dihasilkan secara lokal; retribusi daerah tidak berdampak pada pertumbuhan pendapatan asli daerah; dan pajak wilayah geografis dan retribusi daerah keduanya berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Provinsi dalam penyelidikan perkara Kota Denpasar Menurut Ni Made Marita (2016), penerimaan pajak daerah dari usaha-usaha yang meliputi hotel, restoran, taman hiburan, papan reklame, dan lampu jalan memiliki pengaruh yang menguntungkan dan cukup besar. berdampak pada pendapatan awal daerah. lokal dengan pendapatan tinggi. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah Mempengaruhi Pengeluaran

Modal Kota Sukabumi (Studi Kasus Kota Sukabumi) (1) Pendapatan asli daerah Kota Sukabumi masih rendah yang dievaluasi di atas rata-rata tujuan hanya 56,44%, seperti yang ditunjukkan oleh Desi Rahayu (2020). Ini akibat potensi Sukabumi yang masih terbatas. (2) Pencapaian target rata-rata, yang selama periode studi naik hanya menjadi 17,86 meskipun tidak ada investasi yang dilakukan selama berbulan-bulan, menunjukkan bahwa badan pemerintahan kota Sukabumi terus menghabiskan sedikit untuk proyek modal. (3) Baik sebelum dan sesudah investasi, pendapatan awal terpengaruh. Studi Kasus Empiris Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Menggambarkan Hubungan Penerimaan Pajak Daerah dan Pembayaran Daerah dengan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (1) Pajak daerah memiliki dampak yang cukup besar terhadap pendapatan daerah, seperti yang ditunjukkan oleh Kornelius Harefa (2020) . Pajak daerah berdampak pada pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah untuk kota dan kabupaten (PAD) Sumatera Utara tidak berpengaruh pada pendapatan primer daerah. (2) kabupaten dan kota administratif. Studi Kasus Lembaga Keuangan Daerah di Wilayah Bandung dari tahun 2009 hingga 2015 mengkaji pengaruh transfer daerah dan penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah. (1) Beberapa pajak daerah berdampak besar terhadap pendapatan daerah, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Muhamad Iqbal tahun 2018. (2) Perpajakan daerah tidak memiliki dampak yang terlihat pada pendapatan awal di seluruh wilayah di antara pendapatan, menurut pendapatan.

(3) Di wilayah administrasi Pemungutan pajak dan retribusi daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 Kota Bandung.

Hipotesis

Berkaitan dengan referensi penelitian terdahulu dan landasan teori, sebab hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H1 : Penerimaan Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi

H2: Pendapatan daerah di Kabupaten Sukabumi dipengaruhi oleh retribusi daerah

H3: Pendapatan metropolitan di Kabupaten Sukabumi secara simultan retribusi daerah dan pajak daerah memiliki dampak.

METODOLOGI

Metode penelitian studi kasus yang menggabungkan teknik penelitian kuantitatif dan deskriptif digunakan untuk penyelidikan ini. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah pada data numerik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan karena ketiga data tersebut bersifat kuantitatif maka peneliti menggunakan metode ini. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu informasi dari laporan realisasi pendapatan daerah yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) kemudian dikaji kembali untuk keperluan disertasi.

1. Teknik Pengumpulan Data

Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif ini memanfaatkan populasi dan sampel dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Informasi situs web Badan Pusat Statistik (BPS) tentang PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah untuk wilayah Sukabumi diterapkan dalam penelitian ini.

Dengan menampilkan nilai tertinggi, terendah, terkecil, tipikal, dan standar deviasi, Gambaran komprehensif data disajikan melalui analisis deskriptif.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas ini memeriksa distribusi variabel yang bukan bagian dari model regresi. Selisih antara nilai yang diproyeksikan Jika ada kenormalan, skor aktual, atau kesalahan, akan terdistribusi secara simetris sepanjang rata-rata nol, dan data yang tersisa akan terdistribusi secara merata (Ghozali, 2006:). Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk menentukan normalitas data, dan tingkat signifikansinya ditetapkan sebesar 0,05 (5%). Data dapat dikatakan berdistribusi teratur asalkan nilai signifikansinya melebihi 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menemukan persamaan regresi menggunakan teknik kuadrat terkecil untuk analisis. Data yang diolah menghasilkan empat hipotesis umum.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas menentukan ada atau tidaknya hubungan antara jarak variabel yang tidak termasuk dalam model regresi. Kemampuan model regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel bebas yang berbeda, maka uji ini harus dilakukan. Seharusnya tidak ada sangkutan antara variabel yang tidak bergantung untuk model regresi yang layak.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah variasi residual pada setiap observasi yang dimasukkan dalam model regresi berbeda dengan asumsi heteroskedastisitas konvensional. Model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini dinilai dengan menggunakan uji Glejser. Ketika terdapat tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 antara variabel independen dan nilai absolut residual, temuan menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Teknik untuk menentukan apakah ada keterkaitan antara pengamatan yang berurutan selama beberapa waktu adalah uji autokorelasi. Masalah autokorelasi muncul ketika terdapat ketergantungan antara kesalahan residual di antara pengamatan secara berurutan. Model regresi yang diusulkan tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Uji Durbin-Watson

(DW) merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi autokorelasi. Teori-teori berikut diuji menggunakan uji Durbin-Watson:

Hipotesis Nol (H₀): Tidak ada autokorelasi dalam model (nilai DW = 0-1).

Hipotesis Alternatif (H_a): Terdapat autokorelasi dalam model (nilai DW ≠ 0-1).

Dengan menggunakan uji Durbin-Watson, kita dapat mengevaluasi apakah terdapat autokorelasi dalam model regresi yang telah kita bangun.

Uji Hipotesis

1. Analisis Determinasi (R²)

Ada hubungan linier antara variabel independen dan satu variabel dependen dalam analisis regresi linier berganda. Persentase dampak simultan variabel independen dan variabel dependen dihitung dalam analisis determinasi. Penulis berusaha untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah dan iuran daerah terhadap kenaikan PAD Kabupaten Sukabumi.

2. Uji F

Pengaruh masing-masing dari variabel independen yang disebutkan dalam model regresi terhadap variabel dependen yang akan diuji secara bersama-sama diukur dengan uji F, dengan kriteria uji F adalah bahwa jika nilai signifikan dapat disimpulkan bahwa

F hitung kurang dari 0,05 (5%), bahwa masing-masing dari variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen secara keseluruhan.

3. Uji t

Uji-t digunakan untuk menentukan apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuji secara independen pada taraf signifikan 0,05 (5%). Angka-T dan tabel-t dikontraskan untuk penyelidikan ini pada tingkat signifikansi 0,05. Diketahui bahwa setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan sendirinya jika t-hitung melebihi t-tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu seluruh penelitian yang memperhitungkan rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi yang mana analisis deskriptif tersebut seperti dibawah ini:

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	9	175407670	296141722	236116570,33	45441813,843
Retribusi	9	12363214	40548595	29076548,67	9980176,804

Daerah					
PAD	9	45705 9973	712536 112	58722157 1,56	85021855,0 86
Valid N (listwise)	9				

Dari hasil tabel 1 diatas bahwa jumlah data (N) yang digunakan yaitu ada 9 data.

a. Pendapatan Asli Daerah

Tabel yang disajikan sebelumnya menunjukkan bahwa pendapatan dasar daerah dalam sembilan tahun terakhir dari tahun 2014-2022 bahwa dapat dilihat nilai terkecil PAD pada kabupaten Sukabumi yaitu Rp. 457,05 miliar pada tahun 2014, PAD terbesar yang didapat di Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 712,5 miliar yang didapat pada tahun 2022. Dari tahun 2014-2022 nilai rata-rata yang didapat di kabupaten sukabumi sebesar Rp. 587,2 Itu miliaran dengan Rp. Standar deviasi 85,2 miliar dolar.

b. Pajak Daerah

Menurut temuan analisis deskriptif, pajak daerah yang dihasilkan di kabupaten Sukabumi dari tahun 2014-2022 bahwa pajak daerah terkecil yang didapatkan di Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 175,4 miliar pada tahun 2014 , untuk pajak daerah terbesar yang didapatkan di Kabupaten Sukabumi sebesar Rp. 296,1 miliar pada tahun 2022, untuk rata-rata pendapatan pajak daerah pada kabupaten Sukabumi dari tahun 2014-2022 sebesar Rp. 236,1 miliar, dan untuk nilai standar deviasi sebesar Rp. 45,4 miliar

c. Retribusi Daerah

Dari hasil analisis deskriptif tersebut pendapatan retribusi daerahan pada kabupaten sukabumi dari tahun 2014-2022 terdapat nilai terkecil yang dihasilkan sebesar Rp. 12,3 miliar ditahun 2022 , nilai terbesar yang didapat sebesar Rp. 38,9 miliar ditahun 2017, untuk nilai rata-rata dari tahun 2014-2022 yaitu sebesar RP. 29,0 miliar sedangkan untuk nilai standar deviasinya adalah Rp 9,9 miliar.

Dari hasil tabel diatas bahwa pajak daerah memberikan kontribusi terbesar untuk PAD dibandingkan dengan Retribusi daerah.

Uji Normality

Tabel di bawah menunjukkan hasil uji normalitas penelitian yang menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 2 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD
N		9	9	9
Normal Parameters a,b	Mean	236116570,33	29076548,67	587221571,56
	Std. Deviation	45441813,843	9980176,804	85021855,086
Most Extreme Differences	Absolute	0,200	0,202	0,161
	Positive	0,195	0,125	0,161

	Ne gat ive	-0,200	-0,202	-0,140
Test Statistic				
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				
c. Lilliefors Significance Correction.				
d. This is a lower bound of the true significance.				

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 2, dapat di simpulkan bahwa nilai signikansi (sig) sebesar 0,002, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa data yang lebih di analisis memiliki distribusi yang normal, karena nilai signifkansi nya lebih besar dari 0,05

Uji Asumsi Klasik

Karena tidak semua data dapat digunakan untuk analisis regresi, uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dilakukan pada data untuk menghindari estimasi konvensional.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas yang dijalankan dengan program SPSS ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3 Uji Multikolineritas

Coefficients ^a						
Mod- el	Unstandar- ized Coefficients		Stan- dar- di- zed Coef- ficients	t	Si- g.	Colline- arity Stati- stics
	B	Std. Error	Beta			Tol- era- nce
						V IF

	(C on sta nt)	21359 3613, 830	7780 3787, 572		2, 74 5	0, 0 3 4		
1	Paj ak Da- erah	1,689	0,224	0,90 3	7, 55 2	0, 0 0 0	0,4 35	2, 2 9 8
	Re- tri- bu- si Da- erah	-0,864	1,018	- 0,10 1	- 0, 84 9	0, 4 2 8	0,4 35	2, 2 9 8
a. Dependent Variable: PAD								

Kedua variabel, pajak kota, dan biaya pengguna, memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang sama, yaitu 2,298. Karena nilai Vif tersebut lebih besar dari 10, dapat di simpulkan bahwa terdapat masalah multikolinieritas antara kedua varian tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskendastisitas peneliti menggunakan uji glesjer.

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients						
Model	Unstandardized Coefficients		Stand- ardi- zed Coeff- icients	t	Si- g.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Co nsta nt)	356724 28,190	227746 32,509		1,5 66	0,1 68
	Pa- jak Dae- rah	-0,094	0,065	-0,651	- 1,4 31	0,2 02

Re tri busi Dae rah	0,022	0,298	0,034	0,0 75	0,9 43
a. Dependent Variable: ABS_RES					

Berdasarkan Nilai signifikansi kedua variabel independen tersebut lebih dari 0,05, sesuai dengan hasil di atas. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas kedua variabel tersebut.

Uji Autokorelasi

Tidak adanya uji autokorelasi merupakan prasyarat untuk model regresi. Uji autokorelasi tes Durbin-Watson (DW) adalah teknik yang dituangkan dalam penelitian ini dan hasil keluarannya dibawah ini :

Tabel 5 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. The error in the Estimate	Durbin-Watson
1	,981 ^a	0,963	0,950	18961423,429	1,646
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah					
b. Dependent Variable: PAD					

Berdasarkan hasil output di atas, uji autokorelasi dengan menggunakan Nilai 1,646 diperoleh melalui uji Durbin-Watson (DW). Untuk jumlah data (n) sebesar 10 dan jumlah variabel bebas (k) sebesar 2, nilai do pada tabel DW yang memiliki tingkat signifikansi yang ditentukan (Sig) sebesar 0,05 adalah sebesar 1,699. Tanda (4-dU) adalah 2,301. Dalam kasus ini, nilai DW sebesar 1,646 berada di antara nilai 1,699 dan 2,301, yang

menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi yang signifikan.

Uji Hipotesis

a. Analisis Determinasi (R²)

Untuk hasil dari analisis determinasi bisa dilihat dari tabel tersebut :

Tabel 6 Analisis Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. The error in the Estimate	Durbin-Watson
1	,981 ^a	0,963	0,950	18961423,429	1,646
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah					
b. Dependent Variable: PAD					

Nilai adjusted R-squared berdasarkan Tabel 6 di atas adalah 0,950 atau 95%. Hal ini mengklaim bahwa 95% dari selisih pendapatan asli daerah (PAD) dapat dikaitkan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Kinerja bisnis lokal merupakan faktor lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini, pengelolaan kekayaan daerah secara terpisah, dan variabel hukum lainnya yang dapat berdampak pada sisa 5% (100% - 95%) dapat mempengaruhi PAD.

b. Uji F

Hasil Uji F dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.

1	Regr essio n	5567251326 6827600,00 0	2	2783625663 3413800,00 0	77, 42 3	,0 00 b
	Re sidu al	2157213470 621230,000	6	3595355784 36872,000		
	Total	5782972673 7448900,00 0	8			
a. Dependent Variable: PAD						
b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah						

Pada tabel 7 bahwa hasil dar hasil uji F yaitu 77,423 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan nilai probabilitasnya 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang mampu dikatan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan mempengaruhi signifikan akan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Uji t

Hasil dari uji t bisa dilihat dari tabel dibawah berikut:

Tabel 8 Hasil uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Stand- ardi- zed Coeff icients	t	Si g.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Co nsta nt)	2135936 13,830	778037 87,572		2,7 45	0,0 34
	Pa- jak Dae rah	1,689	0,224	0,903	7,5 52	0,0 00
	Re tri busi Dae rah	-0,864	1,018	-0,101	- 0,8 49	0,4 28
a. Dependent Variable: PAD						

Pengujian dilakukan untuk menentukan dampak variabel independen akan Penda-
apatan Asli Daerah (PAD)—Uji-t dilakukan dengan cara mencocokkan t hitung dan t tabel dengan taraf signifikansi 5%: $2 = 2,5\%$ (uji dua sisi) dengan derajat bebas (df) = $n - k - 1$, atau $9 - 2 - 1 = 6$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel). inde-
penden). Untuk uji dua sisi dengan tingkat dengan signifikansi 0,025, hasil t tabel ada-
lah 2,4469. Oleh karena itu, hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Nilai t hitung variabel pajak daerah ada-
lah 7,552, dan tingkat signifikansinya
adalah 0,000, artinya kurang signifikan
dari 0,05. Konsekuensinya, t hitung >
dari t tabel, $7,552 > 2,4469$. Temuan ini
mendukung klaim H1 bahwa pen-
erimaan pajak daerah berdampak pada
PAD kabupaten Sukabumi.
- 2) Variabel retribusi daerah memiliki t hi-
tung -0,849 dengan nilai Nilai 0,428 lebih
dari 0,05, dianggap signifikan. t hitung t
tabel, atau -0,849 2,4469, digunakan.
Temuan ini menunjukkan bahwa
hipotesis (H2) ditolak dan penerimaan
retribusi daerah tidak memiliki
pengaruh yang berarti terhadap pening-
katan PAD daerah kabupaten Suka-
bumi.

Pembahasan

Penerimaan pajak daerah berpengaruh ter- hadap PAD kabupaten Sukabumi

Menurut hasil pengujian dengan memakai
uji t, didapati bahwa Nilai t estimasi adalah
7,552, dan tingkat signifikansi berada di
bawah ambang batas 0,05 dengan nilai 0,000.

Hasilnya, $t \text{ tabel} > t \text{ hitung}$, atau $7,552 > 2,4469$. Hipotesis alternatif (H_1), yang menyatakan bahwa pendapatan pajak daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukabumi, diadopsi sebagai hasil dari temuan ini.

Penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi

Menurut hasil uji-t, nilai t estimasi ditetapkan sebesar $-0,849$ dengan nilai signifikansi $0,428$, lebih tinggi dari taraf signifikansi $0,05$ dan $t \text{ hitung}$ dan $t \text{ tabel}$ ditunjukkan atau $-0,849 < 2,4469$. Artinya hipotesis alternatif (H_2) terbantahkan. Berdasarkan temuan tersebut, pertumbuhan pendapatan asli daerah di wilayah Sukabumi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh penerimaan retribusi daerah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan nilai signifikansi $0,000$ diberikan pada temuan uji F pada tabel di atas, yaitu $77,423$. Telah diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama berdampak pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersamaan dengan nilai probabilitas di bawah $0,05$. Hal ini menunjukkan kebenaran hipotesis H_3 yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah di Kabupaten Sukabumi dipengaruhi oleh pemungutan pajak dan retribusi daerah secara bersamaan.

Pemasalahan

Hasil uji t menunjukkan bahwa data retribusi daerah tidak memenuhi asumsi normalitas mengalami tingkat signifikansi temuan t -test dalam tabel lebih tinggi dari $0,05$. Nilai t estimasi untuk variabel retribusi daerah adalah $-0,849$, dan nilai signifikansi pada tabel hasil uji t adalah $0,428$, lebih tinggi dari nilai signifikansi yang dilaporkan sebesar $0,05$. Dengan demikian, variabel retribusi daerah tidak signifikan berdasarkan hasil uji t meskipun seharusnya signifikan.

Akibat dan Sebab Permasalahan

a) Sebab Permasalahan

Menurut temuan penelitian tersebut, dibuat model regresi linier, dan dapat ditunjukkan di bawah ini bagaimana dampak pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah:

Pendapatan Asli Daerah (Y) dihitung sebagai berikut: $0,034 + 0,000$ pajak daerah $+ 0,428$ retribusi daerah. Hasil pengujian menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ untuk variabel pajak daerah, yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Namun hasil perhitungan pada uji t -tabel menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ untuk variabel retribusi daerah. Kenaikan retribusi akan berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi.

b) Akibat Masalah

Dari hasil uji t pada variabel retribusi daerah dalam hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah, dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, hasil uji t menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai t hitung pada variabel pajak daerah adalah 7,552 dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, yaitu $7,552 > 2,4469$. Sedangkan untuk variabel retribusi daerah, t hitung-nya adalah -0,849 dengan nilai signifikansi 0,428 yang berada di atas nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, nilai t hitung pada retribusi daerah lebih kecil dari t tabel, yaitu $-0,849 < 2,4469$.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan, Berdasarkan kesimpulan analisis dan pembahasan selanjutnya, (1) Penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi, (2) Penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi, dan (3) Penerimaan pajak keduanya daerah dan retribusi daerah berdampak pada

pendapatan asli daerah Kabupaten Sukabumi.

Saran

Dengan mempertimbangkan analisis yang dilakukan dan temuan yang dihasilkan dari penelitian ini, beberapa rekomendasi yang relevan dapat dibuat, antara lain: (1) pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk mengatur pemungutan pajak dan retribusi daerah secara efektif untuk memenuhi target penerimaan daerah yang sesuai dan sesuai dengan hukum. (2) Pemerintah daerah harus lebih kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membangun kantor untuk memantau pembayaran pajak daerah dan tempat untuk berkonsultasi dengan masyarakat (3) Pendapatan dari retribusi harus meningkat dan berdampak pada pendapatan asli daerah dan menurunkan pajak daerah.

REFERENCE

- Agustian, Desi Rahayu. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Sukabumi." *Jurnal Akuntansi UMMI* 1.1 (2020): 101-111.
- Asteria, Beta. "Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/Kota Di jawa tengah." *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen* 2.1 (2015): 51-61.

- Harefa, Kornelius, and Khairunisa Tampubolon. "PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2020)." JAKPI-Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia 9.2.
- Iqbal, Muhammad, and Widhi Sunardika. "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009–2015)." AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA 9.1 (2018): 10-35.
- Kuntari, Yeni, Anis Chariri, and Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. "THE INFLUENCE OF LOCAL TAX, LOCAL RETRIBUTION, AND AUDIT OPINION ON EXPENDITURE PERFORMANCE IN LOCAL GOVERNMENTS CENTRAL JAVA PROVINCE, INDONESIA." Humanities & Social Sciences Reviews 7.6 (2019): 1172-1181.
- Marita, Ni Made, and Ketut Alit Suardana. "Pengaruh pajak daerah pada pendapatan asli daerah di kota Denpasar." E-jurnal akuntansi universitas udayana 14.1 (2016): 53-65.
- Rudi, Prasetyo, and Ngumar Sutjipto. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah." Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) 6.3 (2017).
- Adisasmita, Rahardjo, (2014) : Pembiayaan Pembangunan Daerah, cetakan ke 2 Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ghozali, Imam, 2006. Econometrica. Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran RI Nomor 4437. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran RI Nomor 4438. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tambahan Lembaran RI Nomor 5049. Sekretariat Negara. Jakarta

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi,
2018. *Sukabumi Dalam Angka Tahun 2018*. Kabupaten Sukabumi:
Badan Pusat Statistik.

RLPPD Kabupaten Sukabumi 2021
www.google.com

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi,
2020. *Sukabumi Dalam Angka Tahun 2020*. Kabupaten Sukabumi:
Badan Pusat statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi,
2023 . *Sukabumi Dalam Angka Tahun 2023*. Kabupaten Sukabumi :
Badan Pusat Statistik